

ISSN-E: 2623-2065  
ISSN-P: 2684-8872

# SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

**Vol 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)**

Pengaruh Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau

*Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi*

Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat

*Berliana Fatihatuz Fiihza, Yulianti*

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa

*Adeliya Putri Ananda, Hudaidah*

Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur

*Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto*

Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam

*Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah*

Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV

*Indira Rahma Syifa*

Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936

*Nukman*

Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang

*Novita Diana Lestari*

Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi

*Tiara Salwadila, Hudaidah*

Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat

*Aprilia Iva Swastika*



# **Dewan Redaksi**

## **SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah**

### **Editor in Chief**

Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

### **Section Editor**

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

### **Guest Editor**

Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya)

Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

### **Reviewer/Mitra Bestari**

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan)

Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

### **Administrasi**

Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

### **Alamat:**

Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626

Website: <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index>

Email: [jurnalsindang@gmail.com](mailto:jurnalsindang@gmail.com)

**SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH**  
**Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)**

	Halaman
Dewan Redaksi .....	i
Daftar Isi .....	ii
1. Pengaruh Model Pembelajaran <i>Contextual Teaching and Learning</i> terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau <i>Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi</i> .....	91
2. Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat <i>Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti</i> .....	95
3. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa <i>Adeliya Putri Ananda, Hudaidah</i> .....	102
4. Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur <i>Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto</i> .....	109
5. Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam <i>Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah</i> .....	122
6. Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV <i>Indira Rahma Syifa</i> .....	132
7. Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936 <i>Nukman</i> .....	139
8. Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang <i>Novita Diana Lestari</i> .....	152
9. Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi <i>Tiara Salwadi, Hudaidah</i> .....	158
10. Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat <i>Aprilia Iva Swastika</i> .....	164

## PERAN PNI DALAM MEMBENTUK KONSEP NASIONALISME 1927-1936

Nukman

Universitas Negeri Malang

Alamat korespondensi: Kunmen24@gmail.com

Diterima: 20 Desember 2020; Direvisi: 9 Juli 2021; Disetujui: 22 Juli 2021

### Abstract

*The role of PNI (Partai Nasional Indonesia) movement organization which was dominated by intellectuals was very influential in the process of forming nationalism. The changes that are felt, especially in the field of education, are influenced by programs that are systematically structured so that the legal bargaining process can be carried out in court without the need for violence. This paper will explain the role of PNI movement organization in building nationalism steps to strengthen and influence in society. The method used in this research is library research. The result of this research is that the PNI movement organization made an effort to build nationalism in various ways, namely by establishing courses, establishibg schools, banks and also strengthening public opinion on PNI's goals by holding public meetings and publishing media such as Banteng Priangan and Persatoen Indonesia newspapers.*

**Keywords:** Nationalism, Movement, PNI.

### Abstrak

Peran organisasi pergerakan PNI (Partai Nasional Indonesia) yang didominasi kaum intelektual ini sangat berpengaruh dalam proses pembentukan nasionalisme. Perubahan yang dirasakan terutama dalam bidang pendidikan dipengaruhi oleh program yang disusun secara sistematis sehingga dalam proses tawar menawar hukum bisa dilakukan dalam persidangan tanpa perlu adanya kekerasan. Tulisan ini akan menjelaskan peran PNI dalam membangun nasionalisme dan langkah memperkuat organisasi dan pengaruh ke masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah Organisasi pergerakan PNI membuat suatu upaya dalam membangun nasionalisme dengan berbagai cara yaitu dengan mendirikan kursus-kursus, mendirikan sekolah-sekolah, bank-bank, dan juga memperkuat opini masyarakat terhadap tujuan PNI dengan rapat-rapat umum dan menerbitkan media seperti surat kabar Banteng Priangan dan Persatoean Indonesia.

**Kata Kunci:** Nasionalisme, Pergerakan, PNI.

### A. Pendahuluan

Latar belakang penelitian Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan merupakan usaha yang membutuhkan adanya persatuan dan kesatuan dari segala lini masyarakat. Kemerdekaan yang diimpikan tidak akan tercapai apabila tidak ada rasa nasionalisme untuk berjuang demi tanah airnya. Salah satu periode memperjuangkan kemerdekaan terjadi pada masa pergerakan nasional dalam bentuk organisasi-organisasi yang memiliki visi misi berbeda dengan lainnya. Pergerakan nasional Indonesia atau lebih tepatnya kesadaran kebangsaan Indonesia dimulai sejak awal abad ke-20.

Namun hal ini tidak terlepas dari serangkaian peristiwa yang terjadi antara tahun 1800-1900 an. Pada masa awal kekuasaan, pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem kapitalisme Barat dalam sistem perekonomiannya dan juga menerapkan kebijakan pemerintahan tidak langsung dan informal. Kemudian adanya kebijakan penyatuan administrasi di seluruh kepulauan nusantara baik melalui upaya perjanjian atau bahkan melalui tindakan militer, menyebabkan terjadinya perubahan sistem yang mana mulanya bersifat pemerintahan tidak langsung menjadi pemerintahan secara langsung yang dikenal dengan politik Pax Neerlandica.

Terbentuknya pergerakan nasional kepada masyarakat merupakan suatu hal penting bagi sejarah berdirinya Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan penderitaan yang telah dialami masyarakat Indonesia akibat penjajahan Pemerintah Hindia-Belanda 1602-1942, karena adanya penderitaan tersebut kemudian melahirkan nasionalisme, terutama nasionalisme yang didasari pada persamaan nasib dan dilakukan dengan cara tidak mengangkat senjata. Pada masa ini perjuangan yang dilakukan oleh para kaum terpelajar atau kaum yang terdidik. Munculnya kaum-kaum yang terdidik ini disebabkan oleh adanya politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer di akhir abad ke 19.

Akibat dari sistem liberalisasi, pemerintah Hindia Belanda menuai beberapa kritikan dari kaum politikus dan intelektual. Salah satu kritikan muncul dari C. Th. Van deventer yang mengungkapkan bahwa Hindia Belanda memiliki hutang budi kepada jajahannya, karena mereka telah meraup untung yang sangat banyak tanpa memberikan kontribusi apapun yang setidaknya berupa standar kehidupan. Kritikan tersebut tampaknya cukup besar pengaruhnya sehingga pemerintah pusat Belanda langsung menindaklanjuti kritikan tersebut dengan memberikan kebijakan baru yang disampaikan langsung oleh Ratu Wilhelmina melalui pidatonya pada tahun 1901. Kebijakan tersebut dikenal dengan Politik Etis, isinya adalah berkaitan dengan edukasi, irigasi dan transmigrasi.

Pada masa pergerakan faktor utamanya adalah munculnya politik etis yang memberikan harapan baru bagi para pejuang Indonesia, dengan adanya politik etis banyak pribumi yang mendapatkan ilmu pengetahuan dan jufga pendidikan sehingga bisa disebut dengan kaum intelektual. Para kaum intelektual memelopori pergerakan agar bisa merubah nasib bangsa Indonesia. Kaum-kaum intelek inilah yang berperan aktif dalam memperjuangkan memikirkan nasib kaum pribumi yang tertindas. Para

kaum intelek mengajak kaum pribumi yang tertindas untuk maju dan melawan, para kaum intelek melakukan perlawanan nya dengan cara membentuk organisasi - organisasi. Para kaum intelek menyusun rencana agar bisa melakukan perlawanan supaya tidak terus ditindas. Pergerakan organisasi - organisasi tersebut.

Pada pihak Belanda sebenarnya tidak ada itikad baik dari Belanda kepada pribumi mereka hanya takut jika rakyat pribumi dibiarkan terus - terusan menderita maka memicu pemberontakan akan terjadi. Pembangunan lembaga pendidikan oleh Belanda tidak didasari oleh adanya lembaga yang teratur, sebab pendirian Lembaga pendidikan ini hanya untuk mempermudah Belanda dalam melaksanakan politiknya. Adanya lembaga pendidikan ini memicu para masyarakat pribumi berpacu untuk meningkatkan intelektual bangsa, walau kebijakannya masih terbatas. Banyak usaha - usaha yang dilakukan kerap kali membuat bangga pemerintah Belanda. Semua mendukung adanya politik etis agar bisa mensejahterkan rakyat Indonesia dalam hal ekonomi maupun pendidikan agar bisa sama rata dengan Hindia Belanda.

Setelah rakyat terutama dari golongan intelektual telah mendapatkan kesadaran kebangsaan, kini perjuangan melalui senjata dan fisik mulai sedikit dikesampingkan. Orientasi perjuangan diubah ke arah persamaan gagasan dan ideologi dengan membentuk sedikit demi sedikit organisasi modern, dalam hal ini fokus pembahasan pada oerorganisasi pergerakan PNI. Pergerakan organisasi PNI memberi warna baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menumbuhkan rasa nasionalisme pada bangsa Indonesia.

Pada tahap penulisan ini penulis menggunakan 5 tahap yaitu, Pemilihan Topik, Pengumpulan Sumber, Verifikasi, Interpretasi, Analisis dan penulisan. Dalam hal ini penulis memilih topik "Pergerakan Nasional". Selanjutnya pengumpulan sumber yang relevan, penulis mengumpulkan dari

beberapa buku dan artikel jurnal terkait. Setelah itu, verifikasi atau kritik terhadap sumber tersebut agar menghasilkan sebuah analisis baru. Kemudian hasil daripada analisis tersebut masuk dalam proses penulisan.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian penulisan artikel ini adalah metode kualitatif yaitu berupa Library Research yang mana merupakan suatu metode yang mengumpulkan sumber data dari berbagai buku tercetak dan online, jurnal online, dan karya ilmiah seperti: skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dan sesuai dengan masalah yang dipecahkan.

Artikel ini mempunyai sasaran yang ditujukan kepada khalayak umum, yaitu kepada masyarakat, dan terkhusus terhadap individu yang ingin menambah informasi dan pengetahuan terkait "Peran Partai Nasional Indonesia dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936".

## C. Pembahasan

### Latar Belakang Berdirinya PNI

Kondisi sosio-politik yang kompleks karena menyesuaikan kondisi politik baru pasca tragedi pemberontakan PKI 1926 yang gagal. Maka diperlukan organisasi baru sebagai wadah aspirasi rakyat untuk menyalurkan aspirasi yang tidak mungkin ditampung oleh organisasi-organisasi politik yang ada pada waktu itu. Kondisi politik kolonial Belanda yang reaksioner dan munculnya gagasan nasionalisme modern di Indonesia telah memberi ruang untuk terbentuknya organisasi-organisasi yang bercorak nasionalisme murni dan bersifat radikal (Soejono & Leirissa, 2010). Organisasi yang akan lahir harus melihat kedepan dan berbenah agar tidak terulang kesalahan yang sama. Pengembangan pemikiran seperti inilah yang harus dilakukan oleh organisasi-organisasi setelahnya.

Perserikatan Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan nama PNI, merupakan partai yang terinspirasi dari masyarakat Marhaen yang digagas oleh Soekarno. PNI adalah partai pelopor dalam aksi massa yang mempunyai tujuan sama dengan kaum Marhaen (Situmorang, 2016). Berawal dari organisasi dari *Algemeene Studieclub* yang didirikan Ir. Soekarno pada tahun 1925 di Bandung untuk kalangan mahasiswa terutama mahasiswa *Teknische Hogeschool* (Sekolah Tinggi Teknik). Perserikatan ini didirikan oleh Ir. Soekarno, Mr. Sartono, Dr. Samsi, Ir. Anwari, J. Tilaar, Mr. Iskaq Tjokroadisuryo, Sudjadi, Mr. Budiarto, dan Mr. Sunario pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung (Suhartono, 1994). Di antara para tokoh pendiri PNI ini, ada lima orang yang merupakan mantan dari anggota Perhimpunan Indonesia (PI), yang pernah belajar di Belanda.

PNI dan PI sebenarnya tidak memiliki hubungan organisasi. namun PNI mempunyai hubungan erat dengan PI di negara Belanda. Kegelapan di negara jajahan ini disoroti oleh organisasi yang mulai mengambil propaganda secara intensif mulai secara lisan maupun tulisan. Tujuannya pokoknya adalah Indonesia merdeka dengan cara membangkitkan semangat kebangsaan menjadi semangat kekuatan nasional dengan memperdalam kesadaran rakyat untuk mengerahkan pergerakan nasional. Untuk memperoleh pergerakan itu, sebuah organisasi membutuhkan asas dan tujuan yang jelas dan tegas. Perlu dilakukan pergerakan dengan suatu teori nasionalisme yang radikal untuk menumbuhkan kemauan nasional menjadi perbuatan atau langkah nasional (Soejono & Leirissa, 2010). Pertemuan tersebut menetapkan Ir. Soekarno sebagai ketua organisasi PNI.

Berdirinya PNI ini, dilatarbelakangi oleh pemikiran Bung Karno yang mengemukakan untuk mendirikan partai radikal, yang menuntut Indonesia merdeka pada tahun (1926\1927), Dahulu banyak teman-temannya yang menentang pemikiran dari Bung Karno,

namun Bung Karno tetap berpegang teguh pada pendapatnya, akhirnya semua temannya menyetujui dan bersatu membentuk Partai Nasional Indonesia yang tujuannya menuntut kemerdekaan Indonesia dan memiliki jumlah anggota yang banyak, dihitung sampai akhir Desember 1929 ada kurang lebih 10.000 anggota (Soejono & Leirissa, 2010). Yang dapat menjadi anggota PNI adalah orang Indonesia yang sekurang-kurangnya telah berumur 18 tahun. Orang-orang Asia lainnya dapat juga menjadi anggota PNI tetapi hanya sebagai anggota luar saja (Tirtoprojo, 1980).

Dalam terbentuknya PNI, terdapat tiga hal yang ditulis oleh Adam Malik, yang membuat PNI berbeda dengan partai lainnya atau sebelumnya (Situmorang, 2016), yaitu :

1. PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927, yang bersamaan dengan tanggal Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Para pendiri PNI kebanyakan terdiri dari sarjana-sarjana muda yang merasa dirangsang dan diilhami oleh pandangan yang jelas dan konsepsi dari para pendiri Republik Amerika Serikat.
2. PNI merupakan partai politik pertama saat penjajahan Belanda yang menggunakan nama Indonesia untuk mengidentifikasi kebulatan dan kesatuan politik di seluruh Nusantara.
3. Ketua partai, merupakan seorang arsitek muda yang berusia 26 tahun, yang di tetapkan untuk memegang peran penting selama 40 taun dalam kebangkitan bangsa dan Negara baru Indonesia.

Berdasarkan uraian ini, pada dasarnya PNI menyatakan bahwa tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka terlepas dari segala penjajahan. Jika Indonesia terlepas dari penjajahan maka susunan kehidupan, struktur politik dan sosial ekonomi akan kembali. Tujuan ini hendak dicapai dengan asas "percaya pada diri sendiri" dan tidak bekerjasama dengan pemerintah Kolonial Belanda. Memperbaiki keadaan politik, sosial,

dan ekonomi dengan kekuatan bangsa sendiri. Yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank nasional, dan lain lain. Sebab itulah PNI bersikap non-koperasi atau tidak ikut dalam dewan-dewan yang diadakan pemerintah. PNI yakin bahwa dengan gerakan-gerakan revolusioner seperti ini, Pemerintah Kolonial Belanda tidak akan memberikan ruang untuk kemerdekaan Indonesia (Tirtoprojo, 1980).

PNI yakin jika Indonesia terlepas dari penjajahan maka susunan kehidupan dan struktur sosial masyarakat Indonesia akan kembali seperti sebagaimana semestinya. Tujuan tersebut bisa tercapai jika bisa berdiri sendiri atau percaya pada diri sendiri dan tidak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. PNI yakin dengan gerakan-gerakan revolusioner, pemerintah kolonial Belanda tidak akan memberikan jalan untuk tercapainya kemerdekaan Indonesia, jadi Rakyat Indonesia harus mencari dan menemukan jalan itu sendiri dengan percaya kepada diri sendiri (Soejono & Leirissa, 2010).

Syarat utama dalam memperbaiki susunan masyarakat Indonesia adalah kemerdekaan politik. Yang dimaksud dengan kemerdekaan politik adalah "berhentinya pemerintahan Belanda". Karena pertimbangan sosial dan ekonomi, Belanda pasti tidak akan rela pergi dari Indonesia. Maka demikian PNI sangat yakin bahwa hanya dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah, dengan persatuan Indonesia tanpa membedakan kelas, agama dan golongan, maka kemerdekaan akan bisa diraih. Dengan membuat program-program pengorganisasian sebanyak-banyaknya pada kongres pertama tanggal 27-30 Mei 1928 di Surabaya. Diasuh oleh semangat membangun persatuan masyarakat, PNI dengan cepat mendapat dukungan dari berbagai pihak. (Soejono & Leirissa, 2010). Peranan Soekarno dalam meningkatkan kehidupan PNI dengan membakar semangat fanatisme rakyat melalui

pidato-pidatonya di berbagai kesempatan walaupun demikian panjangnya inilah yang menjadi salah satu faktor pesatnya pertumbuhan PNI.

### **Peran PNI dalam Menggaungkan Nasionalisme**

Paham Nasionalisme di Indonesia terlahir akibat adanya kolonialisme yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Nasionalisme merupakan sebuah tekad atau kesadaran nasional untuk mempertahankan bangsa dari pihak luar yang dirasa mengancam dan merampas hak bangsa. Kemudian Nasionalisme ini disambut dengan baik oleh kaum intelek atau pelajar yang telah mengenyam pendidikan baik di Hindia Belanda ataupun di Belanda, hal ini lah yang membangkitkan kesadaran nasional. Berdirinya suatu perkumpulan yang mendiskusikan tentang konsep Nasionalisme kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi pergerakan yang ingin merealisasikan konsep Nasionalisme tersebut. PNI merupakan salah satu organisasi yang hendak menggaungkan Nasionalisme sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap praktik kolonialisme di bumi pertiwi, hingga masyarakat merasa diasingkan di dalam negerinya sendiri. Kondisi ini terlihat miris, karena hak rakyat tidak diberikan sesuai dengan jatahnya, baik dari sektor politik, ekonomi dan sosial bahkan kehidupan rakyat terasa menderita lahir dan batin.

Konsep Nasionalisme yang diusung oleh PNI adalah sebuah konsep yang telah diserap dari konsep Nasionalisme yang terjadi di Barat. Menurut Sekarno Nasionalisme Barat tidak berlandaskan pada perikemanusiaan, Nasionalisme yang merupakan konsep dasar timbulnya serang menyerang antar bangsa sehingga munculnya suatu peperangan, hanya terfokuskan pada suatu kepentingan kelompok tertentu dan cenderung pada perdagangan yang menimbang untung -rugi semata. Konsep ini apabila diterapkan pada Indonesia dinilai kurang cocok, karena latar belakang masyarakat Indonesia yang berbeda meskipun dalam

konsepnya hampir memiliki kesamaan yaitu adanya satu golongan atau satu bangsa.

Nasionalisme yang berkembang di Indonesia didasarkan pada perikemanusiaan (sosio-nasionalisme). Soekarno memiliki landasasn bahwa konsep nasionalisme jika didasarkan pada perikemanusiaan akan memunculkan sebuah rasa percaya diri. Rasa percaya diri inilah yang menjadi modal semangat dalam mempertahankan diri di dalam suatu perjuangan melawan kondisi yang talah dibentuk oleh musuh Indonesia (Soekarno, 2018). Konsep Nasionalisme yang berjalan melebar dari perikemanusiaan adalah Nasionalisme yang cenderung bersifat *Chauvinis*, artinya paham Nasionalisme yang menganggap bahwa bangsanya yang lebih unggul daripada bangsa lainnya. Sehingga di kemudian hari Nasionalisme ini akan menjadi musnah dan binasa, disebabkan karena rasa percaya diri yang terlalu tinggi terhadap bangsanya dan penyempitan akal dalam merasionalkan makna Nasionalisme tersebut.

Nasionalisme sebagai wujud manifestasi cinta dan kesetiaan terhadap tanah yang ditempati oleh suatu bangsa yang disebut dengan istilah negara atau tanah air (Murod, 2011). Nasionalisme juga merupakan modal awal suatu bangsa dalam mendirikan negara dan karakter bangsa, hingga pada akhirnya akan dapat menentukan arah kemana negara itu akan berjalan. Kemudian modal tersebut diteruskan dengan cara menghargai sifat humanisme, pluralisme dan tentunya menghargai hak asasi manusia. Konsep inilah yang disebut dengan Nasionalisme yang berlandaskan pada perikemanusiaan (sosio-nasionalisme) bukan Nasionalisme yang cacat atau yang tercipta dari penyempitan akal budi, sebagaimana yang telah terjadi di beberapa negara di Barat.

Pada awalnya Nasionalisme yang dikembangkan Soekarno ini adalah Nasionalisme yang bersifat anti terhadap kolonialisme dan

imperialisme, kemudian makna Nasionalisme berkembang lagi menjadi anti terhadap semua unsur liberal Barat. Perbedaan ciri-ciri Nasionalisme di Barat dan Timur menurut Soekarno bahwa Nasionalisme Barat bercirikan dengan komersialisme, kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme, maka konsep Nasionalisme Timur (Asia) khususnya Indonesia memiliki ciri yang berlawanan yaitu anti terhadap paham-paham itu (Wibowo, 2013). Dapat dipahami dari pemaparan tersebut bahwa seorang Soekarno dikenal oleh khalayak umum, baik dari kalangan akademis ataupun masyarakat biasa dengan tokoh nasionalis tulen. Pemikiran politik Soekarno semuanya ditujukan dan diserahkan pada satu tujuan, yaitu demi kesatuan dan persatuan Indonesia.

Melalui organisasi PNI ini, Soekarno menjadikan PNI sebagai wadah yang mampu menampung konsep Nasionalisme modern yang bersifat radikal (Murod, 2011). Harapan yang ingin Soekarno wujudkan yaitu mampu berjuang dalam bentuk pergerakan sehingga menyebabkan suatu pergerakan yang radikal dalam mengubah sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Jauh daripada itu, bahwa keragaman latar belakang masyarakat Indonesia terkhusus kaum Marhaen itu memunculkan rasa senasib dalam merasakan penderitaan. Sehingga semangat untuk bisa terbebas dari belenggu negeri jajahan dikumandangkan Soekarno dalam bentuk semangat Nasionalisme yang ditempatkan dalam sebuah wadah PNI dan di kemudian hari akan membentuk konsep berpikinya dalam merumuskan gagasan Nasionalis, Islamisme dan Marxisme. Kemudian Soekarno merubah gagasan tersebut dengan istilah NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) dapat hidup berdampingan dan rukun dalam teritorial Indonesia. Dalam PNI ini juga Soekarno menanamkan sangat dalam rasa nasionalisme dalam jiwa masyarakat Indonesia yang anti

terhadap kolonialisme dan imperialisme.

Dalam pemahaman yang lain, PNI ini juga merupakan media yang menampung keseluruhan pemikiran-pemikiran Soekarno muda, mulai dari konsep Nasionalisme sampai asas ideologi Marhaenisme. Semua hasil buah pemikiran Soekarno dituangkan dan diuji cobakan melalui organisasi ini, tentunya untuk mencapai persatuan bangsa. Di bawah kepemimpinan Soekarno, PNI berkembang dengan pesat dan luas jaringannya. Setiap orang yang hendak menjadi anggota daripada PNI ini harus melewati rangkaian kaderisasi yang dikenal dengan "kader forming" (Wibowo, 2013). Dengan adanya kaderisasi ini dapat memudahkan jalan untuk penyebaran pengaruh PNI dalam mewujudkan kesadaran dan persatuan dalam bergerak mengusir para pemeras kekayaan negeri, hasilnya masyarakat lebih memahami dengan mudah arah dan tujuan PNI itu.

Suatu partai harus memiliki kekuatan agar masyarakat percaya terhadap partai tersebut. Untuk membentuk kekuatan politik disuatu partai dibutuhkan strategi-strategi politik yang harus dipikirkan secara matang. Setiap partai pun memiliki strategi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah PNI, yang memiliki strategi politik sendiri untuk memikat hati dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Strategi politik yang dimiliki PNI yaitu (Dewantarina, 2012) :

1. Menyuarakan ideologi Marhaenisme, artinya strategi ini digunakan untuk menghapuskan masyarakat dari kemiskinan dan kesengsaraan yang dihadapi selama penjajahan.
2. Memikat hati masyarakat dengan nama Soekarno, artinya masyarakat percaya bahwa Soekarno bisa membawa masyarakat menuju kesejahteraan dan terbebas dari penjajahan, sehingga masyarakat Indonesia bisa merdeka.
3. Mengadakan pertemuan kelompok di tempat yang penduduknya sedikit, dalam hal ini PNI harus

memperhatikan dimana saja wilayah yang memiliki pendukung sedikit sehingga PNI bisa mengirimkan kader-kader dan sering mengadakan pertemuan kelompok di wilayah tersebut.

4. Saat pemilihan sudah dekat, diadakan ronda malam dan mengingatkan masyarakat untuk memilih PNI
5. Menggunakan kampanye keliling di seluruh kota, dengan mengorasikan tujuan dari PNI tersebut.
6. Menyuarakan program-program melalui Suluh Indonesia, seperti melalui iklan maupun poster-poster.
7. Membuat lagu untuk memberikan semangat para pendukung Partai Nasional Indonesia.

Dari beberapa program strategi di atas yang paling terpenting dan utama adalah PNI memiliki Ideologi Marhaenisme. Seperti yang ada pada salah satu iklannya yaitu, apabila memilih kepala banteng dalam segitiga berarti memilih front marhaenis berarti anti kapitalis dan imperialis yang merupakan tujuan dari Partai Nasional Indonesia (Dewantarina, 2012).

Jika ditinjau dari basisnya bahwa PNI mendapat kepercayaan rakyat dan dikenal merakyat khususnya di daerah Jawa Tengah (Wibowo, 2013). Hal inilah yang sangat didambakan oleh para perintis organisasi PNI ini, tak heran rasanya begitu besar pengaruh yang diberikan PNI kepada masyarakat utamanya yang berada di desa-desa. Kondisi ini tidak lepas dari sosok pemimpin organisasi PNI yang kharismatik, Soekarno menambah rasa kepercayaan orang-orang dari desa untuk ikut andil dalam menjadi kader-kader PNI. Peranan Soekarno dalam PNI terlihat jelas dengan dibuktikan sikap fanatisme masyarakat dalam mendengarkan setiap kata-kata yang keluar dari ucapan Soekarno meskipun itu berlangsung dalam durasi yang berjam-jam.

Nama Soekarno dapat memikat hati masyarakat, karena masyarakat percaya Soekarno yang bisa menghapuskan penjajahan sehingga membawa

masyarakat Indonesia merdeka. Soekarno adalah sosok pejuang yang memiliki keberanian dan berjiwa politik. Hal ini dibuktikannya ketika besekolah di Surabaya ia mengikuti sebuah kelompok anak muda yang disebut dengan Jong Java. Kemudian berlanjut sampai Soekarno kuliah di Bandung (Situmorang, 2016). Alasan ia terjun ke dunia politik adalah ia sering melihat ketidakadilan dan penindasan bangsa kolonialis terhadap rakyat pribumi. Rakyat sangat terpuruk dari segi ekonomi, mereka hidup dalam kekurangan dan diperbudak di negerinya sendiri. Menurut Soekarno kelompok Kolonialisme dan Imperialisme saling keterkaitan, tujuannya tak lain untuk mencari keuntungan dan mengeksploitasi rakyat.

Pada tanggal 18-20 Mei 1929 diadakan kongres PNI yang kedua di Jakarta yang membahas tentang bidang sosial ekonomi, politik dan tentang transmigrasi untuk mengatasi kemelatan masyarakat (terutama daerah yang memiliki kepadatan penduduk). Setelah diadakannya kongres kedua ini, kegiatan PNI semakin meningkat terutama untuk konsolidasi kekuatan. Seperti kursus pimpinan yang dilakukan oleh petinggi saja yakni Ir. Soekarno, Mr. Ishaq Tjokroadisurjo untuk 10-12 orang dan diadakan di Bandung dan kursus biasa didaerah-daerah dimana pengikut kursus ini diuji dan bila lulus akan diterima menjadi anggota. Selain itu juga diadakan ruang diskusi yang melatih anggota untuk memecahkan permasalahan dan meningkatkan kemampuan seluruh anggota (Soejono & Leirissa, 2010).

Kampanye yang diselenggarakan oleh anggota-anggota PNI dilakukan dengan mengorasikan tujuan dari PNI juga meyakinkan masyarakat untuk memilih dan percaya kepada PNI. Anggota-anggota PNI menyampaikan kampanye menggunakan kata-kata yang menarik dan tidak menyinggung atau kasar sehingga menarik simpati masyarakat. Selain dengan kampanye

anggota PNI menggunakan media cetak milik PNI yaitu *Suluh Indonesia*, surat kabar *Banteng Priangan* (di Bandung) dan *Persatoean Indonesia* (di Jakarta). Perkembangan signifikan PNI tersebut membuat cemas pemerintahan Kolonial Belanda (Soejono & Leirissa, 2010). Pada salah satu iklan di *Suluh Indonesia* yaitu apabila memilih kepala banteng dalam segitiga berarti memilih Front Marhaenis yang anti kapitalis dan imperialis. Media cetak juga memberi ide anggota PNI yaitu dengan ditambah menggunakan media lagu bukan hanya untuk orang dewasa bahkan anak-anak pun lebih mudah untuk mendoktrin pikiran dan mengingat tentang PNI, sehingga membuat masyarakat tertarik dengan PNI.

Anggota-anggota PNI juga mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah kerja dengan rapat kelompok tidak dengan rapat umum. Selain itu anggota-anggota PNI mengingatkan masyarakat untuk memilih PNI dan memberi tahu cara untuk memilih PNI dengan menusuk kepala banteng. Dalam hal ini, PNI juga memiliki dukungan besar dari kaum priyayi, abangan, sekuler, buruh dan petani menengah (Dewantarina, 2012).

### **Ideologi PNI**

Ideologi adalah sebuah hasil pemikiran yang dihasilkan dari pemikiran seseorang melalui berbagai pertimbangan dalam keadaan suatu masyarakat, pemerintahan dan negara. Ideologi marhaenisme adalah sebuah hasil pemikiran dari seorang yang berani dengan tegas melawan kolonialisme dan kapitalisme, dia adalah bapak proklamator Soekarno. Marhaenisme ini muncul pada zaman pergerakan di saat perekonomian rakyat dikuasai oleh para penjajah dan pemilik modal yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan membuat rakyat sengsara. Hal inilah yang dilihat oleh Soekarno, sehingga menggerakkan hatinya untuk melawan penindasan terhadap rakyat kecil dan membentuk sebuah partai radikal yang disebut

dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Sebagai ideologi, marhaenisme tumbuh dan lahir di kalangan bawah dan menentang keras keberadaan kaum kapitalis yang menguasai sumber daya alam (Kuswono, 2016).

Menurut Soekarno, Marhaenisme adalah lambang yang menggambarkan pergerakan rakyat dan orang-orang kecil yang tertindas. Marhaenisme juga mewakili kelompok minoritas rakyat Indonesia yang terasingkan di dalam negerinya sendiri, seperti para buruh pabrik, buruh tani, pedagang. Marhaenisme sangat berbanding terbalik dengan paham imperialisme dan kolonialisme, karena marhaenisme sangat memperhatikan kesejahteraan daripada rakyat kecil atau ingin menyetarakan derajat semua orang. Soekarno ingin rakyat Indonesia tebebas dari jajahan kaum imperialisme. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk memahami lebih lanjut tentang arti Marhaenisme di Indonesia, mengetahui bagaimana penerapan Ideologi Marhaenisme di Indonesia, serta untuk mengetahui peran Ideologi Marhaenisme dalam asas PNI.

Marhaenisme merupakan sebuah pemikiran yang membela kaum bawah yang menyuarakan anti kemiskinan. Bagi Soekarno, Marhaen bukan hanya melambangkan perwakilan kelas bawah layaknya partai buruh di negara-negara maju, Soekarno menganggap Marhaen mewakili mayoritas rakyat Indonesia yang pada umumnya hidup termajinakan (Kuswono, 2016). Ajaran Marhaenisme muncul sekitar tahun 1927 ketika Soekarno sedang jalan-jalan di daerah Bandung, soekarno bertemu dengan seorang petani yang sedang menggarap sawahnya dengan alat produksinya sendiri dan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarganya saja. Kemudian Soekarno menanyakan nama dari petani tersebut, Marhaen namanya. Dari kejadian itu Soekarno terinspirasi untuk menggunakan nama itu sebagai perwakilan dari rakyat kecil yang tertindas. Marhaenisme muncul dari

orang-orang yang hidup berkecukupan dan kekurangan (Situmorang, 2016).

Ada dua versi tentang penamaan Marhaenisme. Pertama, nama seorang petani yang dijumpai Soekarno di Bandung. Sangatlah jelas bahwa Marhaen adalah seorang petani bukan seorang proletar (orang yang tidak menjual tenaganya untuk orang lain). Soekarno sering menggunakan kata Marhaen untuk mewakili orang miskin yang berada di bawah kekuasaan kaum kolonialis (Kuswono, 2016). Kedua, istilah Marhaenisme merupakan akronim dari paham marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dari Barat. Bahkan menurut Ruslan Abdulgani jika ingin memahami paham Marhaenisme maka terlebih dahulu harus memahami Marxisme.

Tetapi Soekarno sedikit kurang setuju tentang ajaran dari Karl Marx, ia memiliki pandangan bahwa konsep dari Marhaenisme berbeda dengan Marxisme. Konsep Marhaen mewakili sebagian besar masyarakat yang tertindas dan proletar hanya mencakup sedikit, kaum Marhaen mayoritas seorang petani, buruh tani dan buruh pabrik sedangkan proletar hanya buruh saja (Kuswono, 2016). Soekarno mengambil benang merah dari paham Marxisme. Soekarno tidak langsung mengambil paham itu secara mentah, tetapi Soekarno berpikir secara kritis dan mengadopsi paham itu ke paham yang Soekarno kembangkan, Marhaenisme.

Perbedaan konsep Marhaen milik Soekarno dengan konsep proletar milik Karl Marx terletak pada daerah berkembangnya konsep itu. Relevansi konsep proletar lebih tepat digunakan di Industri Barat yang kebanyakan berprofesi sebagai buruh dan tidak memiliki alat produksi dan hanya mengandalkan pada penjualan jasa. Sedangkan konsep Marhaen di Indonesia lebih tepat karena memang kondisi masyarakat Indonesia yang merupakan kaum agraris, sehingga berbeda dalam segi geografis dan kondisi masyarakatnya namun sama pada konsepnya yaitu ingin terlepas

dari jeratan sistem Imperialisme dan Kapitalisme. Melalui gagasan Marhaenisme ini, dijadikan sebagai landasan teori dalam merumuskan perjuangan untuk mengubur dalam-dalam sistem yang telah membusuk dalam diri bangsa Indonesia.

Marhaenisme sering pula disebut sebagai ideologi yang didalamnya mengandung perasaan dari Pancasila. Dikatakan demikian karena Marhaenisme merupakan metode berpikir Marxis namun penafsiran dan penerapan ajaran menyesuaikan dengan keadaan sosial-politik yang ada di Indonesia. Dibentuknya ideologi ini sebagai langkah upaya mematikan sistem lama lalu menggantinya dengan sistem yang baru. Sistem lama yang dimaksud ialah sistem yang memiskinkan dan menindas digantikan dengan sistem kesejahteraan serta berkeadilan sosial. Istilah Marhaenisme adalah potret buram para kaum buruh dan tani Indonesia yang serba kekurangan serta sengsara akan nasib hidupnya (Kuswono, 2016).

Melalui uraian diatas, Marhaenisme menjadi sebuah gagasan awal menuju masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial. Golongan petani kecil, buruh kecil, pedagang kecil dan pelayar kecil serta kaum melarat lainnya dapat disebut Kaum Marhaen. Sedangkan Marhaenisme rujuk pada sebutan bagi pengikut ajaran Marhaenisme (Supriadi, 2006). Kaum Marhaen dan Marhaenis memikul tiga tugas utama, yakni:

1. Membangun kesadaran rakyat atas penderitaan serta sebab-sebab yang kiranya dapat mengakibatkan penderitaan,
2. Membangun kaum Marhaen dan Marhaenis agar dapat menentukan tata kehidupan berbangsa serta bernegara, dan
3. Menggalang kekuatan yang mendukung tercapainya revolusi Indonesia menuju arah lebih baik sesuai dengan tahapan-tahapannya atau kekuatan progresif revolusioner yang berarti kekuatan yang berpikiran maju kearah terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil

makmur dan beradab serta masyarakat tanpa penindasan oleh manusia atas manusia ataupun oleh bangsa atas bangsa.

Soekarno mengungkapkan bahwa Marhaenisme merupakan ideologi yang mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan Kaum Marhaen serta menghendaki hilangnya bentuk ideologi Kapitalisme dan Imperialisme yang menyengsarakan rakyat. Marhaenisme sendiri memiliki 3 nilai dasar yaitu, (1) sosio-nasionalisme, (2) sosio-demokrasi dan (3) ketuhanan yang mahaesa (prinsip ketuhanan yang universal, bukan prinsip keagamaan (Farid, 2015) Sosionasionalisme adalah paham yang mengandung nilai kebangsaan yang sehat dan berdasarkan perikemanusiaan, persamaan nasib, gotong royong, hidup kemasyarakatan yang sehat, kerjasama untuk mencapai sama bahagia, tidak untuk menggencet dan menghisap (Ayu, 2016). Selaras dengan sosio-nasionalisme, sosio demokrasi adalah paham yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Rakyat yang mengatur negaranya, perekonomiannya, dan kemajuannya, supaya sesuatu bisa bersifat adil, tidak membeda-bedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan ketuhanan yang mahaesa memiliki maksud agar manusia tak hanya memikirkan urusannya dengan Tuhan namun juga dengan sesama manusia. Ketuhanan yang dipikirkan oleh Soekarno adalah Ketuhanan yang melahirkan tatanan tanpa adanya penindasan, tanpa kekerasan dan masyarakat Indonesia siap hidup dalam pluralisme (keberagaman) keagamaan.

Rumusan asas marhaenisme ini dijelaskan Bung Karno sebagai berikut (Ayu, 2016) :

1. Marhaenisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan negara yang didalam segala halnya menyelamatkan kaum marhaen.
2. Marhaenisme adalah cara perjuangan yang revolusioner sesuai dengan watak kaum marhaen pada umumnya.

3. Marhaenisme sekaligus sebagai asas dan cara perjuangan yang revolusioner menuju kepada hilangnya kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme.

Dalam Ayu (Ayu, 2016) juga dijelaskan bahwa Marhaenisme adalah ideologi yang bertujuan menghilangkan penindasan, penghisapan, pemerasan, penganiayaan dan berupaya mencapai serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, melalui kemerdekaan nasional, melalui demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Menurut pandangan Soekarno ideologi Marhaenisme bukanlah sekedar ideologi belaka, namun ada makna yang tersimpan di dalamnya yaitu sebagai ideologi politik yang dimasukkan dalam jiwa PNI. Dalam tulisannya Soekarno (Soekarno, 2018), menyebutkan bahwa dalam sebuah politik yang pertama kali harus dilakukan bukanlah menciptakan sebuah ide atau gagasan tapi harus menyusun sebuah kekuatan yang didasarkan pada ide atau gagasan tersebut. Maka haruslah ada *machtsoorming* yang mampu mematahkan segala usaha musuh. Hal ini yang ditekankan oleh Soekarno dalam menyuarakan semangat perjuangan melawan bentuk tindakan yang bertentangan dengan kondisi kaum Marhaen. Perjuangan kaum Marhaen tidaklah cukup jika hanya menggerutu atau vocal saja, juga harus dilakukan sebuah aksi massa yang sadar akan tujuan sebuah perjuangan, dalam hal ini yaitu memutus rantai Imperialisme dan Kapitalisme.

Penyebaran paham-paham baru kian mulai dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dari berbagai media massa yang dibentuk melalui tulisan kaum terpelajar. Begitu juga dengan penyebaran paham Marhaenisme ini melalui media massa *Fikiran Rakyat* (Kuswono, 2016), selain penyebarannya melalui organisasi PNI yang menjadikan paham Marhaenisme ini sebuah asas dalam perjuangannya. Soekarno juga mengembangkan Marhaenisme ini sebagai gerakan non-kooperatif dan asas perjuangan revolusioner yang ditempuh

oleh kaum Marhaen dalam menghancurkan kolonialisme dan imperialisme. Pada akhirnya konsep Marhaen ini dibawa oleh Soekarno pada saat perencanaan perumusan dasar negara tahun 1945. Hal ini dapat ditinjau dari pemikirannya dalam menyatukan ketiga unsur ideologi yang berbeda dalam satu bingkai, NASAKOM.

### **Pembubaran Organisasi PNI**

Gubernur Jendral De Graeff sebagai seorang yang liberalis lebih condong menjalankan politik toleransi, namun desakan konservatif Belanda dan adanya organisasi seperti PNI memaksa dia untuk bertindak keras. Belanda menilai organisasi PNI dianggap berbahaya dengan tindakan revolusioner banyak gagasan dan anggotanya bekas PI. Pengaruh PNI semakin besar dan membuat pemerintah Kolonial Belanda untuk mengambil tindakan demi membendung gerakan-gerakan PNI, maka dilakukanlah berbagai upaya untuk melakukan tindakan tegas terhadap petinggi-petinggi PNI. Berita akan dilancarkan pemberontakan pada tahun 1930 menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap petinggi PNI (Suhartono, 1994).

Pemerintah Kolonial Belanda dengan terus terang menyatakan kecurigaannya pada PNI pada tanggal 9 juli 1929. Kemudian pada tanggal 6 agustus 1929 mengeluarkan ancaman dan provokasi kepada PNI. Dalam rapat umum tanggal 15 september 1929 di Bandung, Ir. Soekarno mengatakan bahwa walaupun ada usaha-usaha untuk menghalangi kegiatan-kegiatan PNI dengan berbagai cara seperti melarang Ir. Soekarno pergi ke luar Jawa. Kekhawatiran pemerintah Kolonial Belanda semakin besar tatkala mendengar kabar bahwa kalangan Tentara dan Polisi mendapat pengaruh dari PNI. Langkah yang diambil pemerintah Kolonial Belanda adalah melarang anggota polisi menjadi bagian dari PNI. Hal serupa juga diberikan

kepada anggota militer, pegawai negeri untuk pelarangan ikut bergabung dengan PNI. Bahkan juga dilarang untuk membaca surat kabar berita yang berkedok perjuangan kemerdekaan (Soejono & Leirissa, 2010).

Partai Nasional Indonesia dibubarkan karena dianggap membahayakan pihak Belanda, karena mereka akan menyebarkan berbagai ajaran untuk berusaha mencapai kemerdekaan Indonesia dengan menghabisi riwayat penjajahan Kolonial Belanda (Dewantarina, 2012). Sehingga pada tanggal 29 Desember 1929, terjadi penangkapan oleh kolonial Belanda yang telah direncanakan sebelumnya terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti, Ir. Soekarno, Gatot Mangkoepraja, Soepriadinata, Maskoen Soemadiredja (Soejono & Leirissa, 2010), yang saat itu sedang menghadiri rapat PPPKI (Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) di Surakarta. Para tokoh PNI ini disidang oleh Pengadilan Belanda pada tanggal 18 Agustus 1930, yang kemudian dibawa ke Penjara Sukamiskin yang ada di Bandung. Pada saat persidangan Soekarno menulis dan menyampaikan pidatonya yang berjudul "Indonesia Menggugat" dihadapan pengadilan Belanda (Dewantarina, 2012). Hal ini mendorong kaum pergerakan yang lain untuk mengajukan protes. Penangkapan atas pemimpin-pemimpin PNI ini terutama Ir. Soekarno yang merupakan nyawa bagi penggerak PNI merupakan pukulan berat bagi para anggotanya.

Pada tanggal 25 April 1931 saat Soekarno di penjara, PNI mengadakan kongres Luar Biasa yang diselenggarakan di Batavia. Konferensi ini berisi tentang pembubaran PNI, karena empat pemimpin PNI telah dipenjara oleh kolonial Belanda. Sehingga, beberapa hari kemudian PNI diganti dengan menggunakan nama Indonesia yaitu Partindo (Partai Indonesia) yang didirikan oleh beberapa orang mantan anggota PNI, yang diketuai oleh Mr. Sartono dengan tujuan memerdekakan Indonesia yang berasaskan nasionalisme dan percaya

pada diri sendiri, dan akhirnya Soekarno bergabung dengan Partindo dan menjadi pemimpinnya (Soejono & Leirissa, 2010).

Namun setelah didirikan Partindo, terjadi banyak permasalahan, disebabkan karena ada pihak yang tidak setuju. Seperti Moh. Hatta yang menolak keras pembubaran PNI dan diubah menjadi Partindo, yang kemudian Moh. Hatta meminta untuk membuat partai baru yang diberi nama PNI-Baru (Pendidikan Nasional Indonesia-Baru) yang dibentuk di Yogyakarta dan dipimpin oleh Sutan Syahrir dan Moh. Hatta. PNI-Baru banyak dikuasai oleh orang-orang Indonesia yang merupakan anak-anak dari pejabat desa atau pegawai rendah (Situmorang, 2016).

Organisasi PNI-Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) memiliki konsep pendidikan kader yang digagas oleh Moh. Hatta. Menurutnya sikap PNI-Baru memiliki tujuan untuk mendidik orang khususnya generasi muda bangsa supaya mengerti dan tahu apa yang sedang diperjuangkan. Sehingga makna pergerakan dan kesadaran dalam berjuang tidak hanya dalam angan namun ada dalam bentuk nyata dalam mewujudkan konsep Nasionalisme. Kader-kader dari PNI-Baru didik melalui kursus, rapat umum, majelis pemberi keterangan ataupun dengan cara menulis yang dimuat dalam surat kabar *Daulat Ra'jat*. PNI-Baru menegaskan bahwa perkumpulan ini bersifat pendidikan (Soejono & Leirissa, 2010).

PNI-Baru ini berkembang cukup pesat setelah organisasi ini dipimpin oleh Sultan Syahrir dan kemudian Mohammad Hatta. Pada tahun 1932 PNI-Baru sering mengadakan rapat-rapat propropaganda. Materi yang disampaikan antara lain tentang riwayat pergerakan nasional Indonesia, Kemerdekaan Indonesia, kedudukan daerah jajahan dan upaya untuk mencapai kemerdekaan itu, persatuan, kapitalisme, dan imperialisme. Organisasi pergerakan Partindo maupun PNI-Baru dinilai pihak pemerintah membahayakan keabsahan pemerintah. Ditekankan kedua partai itu melalui berbagai cara, seperti pembatasan kebebasan berbicara dalam rapat-rapat, dilaksanakan hak luar biasa Gubernur Jenderal yaitu *exorbitantrecht* dan adanya larangan untuk mengadakan rapat dan berkumpul yang berlaku di Indonesia.

Dalam prakteknya PNI-Baru dan Partindo selalu berbentahan dalam paham

politik, antara lain mengenai soal swadesi yang dianjurkan Mr. Sartono yang mendapatkan tantangan baru Drs. Mohammad Hatta. Partindo dengan surat kabarnya Persatuan Indonesia selalu berperang pena dengan PNI-Baru melalui surat kabar *Kedaulatan Rakyat*. Partindo dan PNI-Baru memiliki tujuan yang berbeda walaupun mereka setuju bahwa kemerdekaan politik adalah tujuan perjuangan yang utama. Perbedaan tersebut yaitu, PNI-Baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan sosial, sedangkan Partindo lebih percaya bahwa organisasi massa dengan aksi massa adalah senjata yang tepat untuk mencapai kemerdekaan. Namun, pada tanggal 18 November 1936, akhirnya Partindo dan PNI-Baru dibubarkan karena terjadi persaingan antara pemimpin-pemimpin (Soejono & Leirissa, 2010).

#### D. Kesimpulan

Pergerakan memberi harapan baru bagi bangsa Indonesia karena dengan melakukan pergerakan - pergerakan melalui organisasi - organisasi yang dibentuk oleh kaum intelektual bisa membuat mereka tidak ditindas, pelanggaran hak asasi dan kuangnya pendidikan. Hal ini membuat jiwa nasionalisme muncul dan memiliki sikap anti penjajah dan patriotisme. Ciri utama bangsa Indonesia adalah berhaluan kiri dan radikal, Organisasi - organisasi ini terus berkembang sebagai wujud nasionalisme serta perjuangan bangsa Indonesia. Partai Nasional Indonesia merupakan partai politik yang didirikan pada tahun 1927, dengan nama awal Perserikatan Nasional Indonesia. PNI sangat berkaitan erat dengan Ideologi Marhaenisme karena memiliki tujuan yang sama yaitu membebaskan rakyat dari kesengsaraan dan kemiskinan. Marhaenisme sendiri adalah ideologi yang dicetuskan oleh Soekarno pada zaman pergerakan disaat perekonomian rakyat dikuasai oleh para penjajah kolonial Belanda, yang bertujuan menghilangkan penindasan, pemerasan, penganiayaan dan berupaya masyarakat yang adil dan makmur, melalui kemerdekaan nasional.

PNI didirikan oleh Soekarno dan delapan temannya di Bandung. Banyaknya tantangan yang dihadapi PNI saat pelaksanaannya, seperti

dibubarkan oleh kolonial Belanda karena dianggap membahayakan pihaknya, serta PNI yang diganti dengan nama Partindo yang ditolak keras oleh Moh. Hatta, sehingga beliau bersama Sutan Syahrir mendirikan PNI-Baru atau Pendidikan Nasional Indonesia Baru. Dalam memperoleh banyak dukungan dari masyarakat saat mengikuti pemilu tahun 1955, PNI melaksanakan beberapa strategi agar dapat memikat hati masyarakat Indonesia. Seperti menggunakan Ideologi Marhaenisme yang dicetuskan oleh Soekarno, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kelompok yang wilayah pendukungnya sangat minim, mengadakan program-program melalui iklan, mengadakan kampanye, mengadakan kaderisasi sebelum menjadi anggota dan masih banyak lagi. Oleh karena itu masyarakat menjadi tertarik dan banyak yang mendukung Partai Nasional Indonesia.

Dengan lahirnya PNI pada masa pergerakan tidak cukup bila diartikan sebagai satu partai yang muncul diantara partai lain, lebih daripada itu PNI adalah sebuah partai yang baru yang berdedikasi untuk kesatuan negara Indonesia yang majemuk masyarakatnya. Sebagai satu partai yang berasas Marhaenisme dan bersifat Nasionalis, tugas inti yang disematkan dalam jiwa PNI adalah menyatukan kemajemukan masyarakat Indonesia dari berbagai daerah tanpa membedakan perbedaan baik dari segi ras, suku dan agama. Hal tersebut tak lain dan tidak bukan untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia, caranya dengan menghapuskan pengaruh kolonialisme dan imperialisme.

### Daftar Referensi

Ayu, W. (2016). *Marxisme, Marhaenisme, G30S/PKI*. Retrieved from [http://www.academia.edu/22618081/Marxisme\\_Marhaenisme\\_G30S\\_PKI](http://www.academia.edu/22618081/Marxisme_Marhaenisme_G30S_PKI).  
Dewantarina, A. (2012). Partai Nasional Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 1955 di Semarang. *Journal Of Indonesian History*, 74-77.

Farid. (2015). *Pemikiran Marhaenisme Soekarno dalam Perspektif Filsafat Sosial*. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18241/1/AGUS%20SUPRIADIFUF.pdf>.  
Kuswono. (2016). Marhaenism: Social Ideology Create by Soekarno. *Jurnal HISTORIA*, 119-120.  
Murod, A. C. (2011, Agustus 2). Nasionalisme "Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA*, XVI, No. 2, 45-58.  
Situmorang, J. T. (2016). *BUNG KARNO: Biografi Putra Sang Fajar*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.  
Soejono, R.P & Leirissa, R.Z. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda (Vol. V)*. Jakarta: Balai Pustaka.  
Soekarno. (2018). *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme: Pikiran-pikiran Soekarno Muda*. Bandung: Sega Arsy.  
Suhartono. (1994). *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.  
Supriadi, A. (2006). *Pemikiran Soekarno tentang Marhaenisme*. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18241/1/AGUS%20SUPRIADIFUF.pdf>.  
Tirtoprojo, S. (1980). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.  
Wibowo, G. A. (2013). Konsep Nasionalisme Soekarno dalam PNI 1927-1930. *AGASTYA: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 3(2), 21-36.